

KURIKULUM BERBASIS GENDER (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)

Iswah Adriana

Abstrak: Essentially education includes the principles of gender equity. Biased gender in education results on unobtainable of educational goals. For that reason, it is required an equal education where the curriculum of the institution integrates gender within its subjects and lectures. Through this paper, the writer will explain the importance of gender equity in education in relation to curriculum and its application.

Kata kunci: kurikulum, gender, pendidikan

Pendahuluan

Dalam wacana feminisme, kesetaraan (*equality*) merupakan kajian yang sangat prinsip. Mengapa ketidakadilan dan berbagai persoalan perempuan muncul di permukaan? Penyebabnya adalah ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Sementara ketidakadilan itu bukan hanya milik kelompok, tetapi berakibat pula bagi generasi selanjutnya.

Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Dengan kata lain lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Untuk itu sejak awal perlu diupayakan terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan.

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Orang tua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin, menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan

sekolah, lebih baik langsung dinikahkan atau didorong untuk bekerja di sektor publik sebagai PRT (pembantu rumah tangga) atau buruh informal. Kondisi demikian yang menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak sosial-ekonomi-budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh (menikmati) pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah.

Membaca realitas di atas, dunia pendidikan di negeri ini telah mendiskriminasi hak-hak anak perempuan. Untuk itulah saat ini perlu bagi kalangan penggiat pendidikan alternatif untuk mengembangkan program pendidikan berbasis kesetaraan gender, yakni: *Pertama*, perlu dirumuskan reorientasi kurikulum pendidikan sekolah alternatif yang sensitif gender, sehingga ada penghormatan terhadap hak-hak anak-anak perempuan. *Kedua*, perlu kalangan penggiat pendidikan alternatif untuk mendesak adanya plafon subsidi anggaran pendidikan yang khusus untuk anak-anak usia sekolah dari komunitas perempuan (keluarga miskin), sehingga mereka bisa melanjutkan studi setidaknya sampai lulus jenjang sekolah menengah atas. *Ketiga*, perlu diimplementasikan program visonaristik yakni perwujudan kesetaraan hak pendidikan bagi anak perempuan dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan, kesetaraan dalam mengaktualisasikan diri dalam proses/kegiatan belajar mengajar. *Keempat*, kesetaraan dalam mengaktualisasikan diri dalam proses dan kegiatan belajar-mengajar.

Konsep Gender dan Seks

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakan-nya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut

dengan gender¹. Jadi *gender* diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan *sex* adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam *gender* ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.

Semua ini adalah titik tolak pembahasan analisis gender, *sex* dan gender, seperti sisi mata uang, kita berbicara biologis dan secara tidak langsung kita juga berbicara antara fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan *sunnatullah* sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan.² Gender masih diartikan oleh masyarakat

¹Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8-9.

²Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 25

sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

1. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
2. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
3. Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumah-tanggaan. Label kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" merugikan, jika hendak aktif dalam "kegiatan laki-laki" seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

4. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
5. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan *fifty-fifty* akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.

Ketimpangan Gender dalam Pendidikan

Kebijakan nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan (pasal 7). Selanjutnya, GBHN 1999 menggariskan dua hal pokok berkaitan dengan kebijakan pendidikan. *Pertama*, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada

setiap jenjang pendidikan; dan *kedua*, melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik. Meskipun kebijakan nasional di bidang pendidikan seperti dipaparkan di atas sudah cukup memadai untuk dijadikan acuan pembangunan pendidikan yang berwawasan gender, namun dalam realitasnya masih saja terjadi ketimpangan gender.

Ketimpangan gender dalam pendidikan, antara lain berwujud kesenjangan memperoleh kesempatan yang konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangan-nya. Kesenjangan ini pada gilirannya membawa kepada berbedanya rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan gender dapat pula diamati dari segi isi buku pelajaran. Kebanyakan muatan buku pelajaran, khususnya Bahasa dan Sastra, IPS, PPKN, Pendidikan Jasmani, Kesenian dan sejenisnya, yang membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat cenderung masih menganut nilai-nilai yang bias gender. Perempuan dalam buku-buku tersebut masih ditempatkan dalam peran-peran domestik (*domestic roles*), sebaliknya laki-laki diposisikan dalam peran-peran publik (*productive roles*). Dengan demikian isi buku-buku tersebut masih mengakui adanya segregasi ruang yang ketat antara laki-laki dan perempuan; laki-laki di ruang publik, sedangkan perempuan di ruang domestik. Kurikulum dan materi pelajaran yang belum mengacu kepada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender akan menyebabkan perempuan tetap tidak mempunyai mentalitas sebagai warga masyarakat yang produktif.

Sejumlah hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesenjangan gender bukan diakibatkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terdapat sejumlah faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya, dapat disebutkan empat faktor utama, yakni faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Faktor akses terlihat nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias laki-laki (*bias toward male*). Dalam kedua proses ini harus diakui proporsi laki-laki sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat pada penulis buku-buku pelajaran dalam berbagai bidang studi yang mayoritas adalah

laki-laki (85%). Selain itu, jumlah tenaga pengajar, khususnya pada SLTP ke atas lebih didominasi laki-laki. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi bias laki-laki (*bias against female*). Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sensitivitas gender masyarakat, baik laki-laki dan perempuan masih sangat rendah.

Kontrol terhadap kebijakan pendidikan lebih didominasi laki-laki, mengingat laki-laki lebih banyak berada pada posisi strategis dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam jabatan struktural, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah. Hal itu menyebabkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan relatif masih rendah. Akibatnya, sejumlah kebijakan dalam pendidikan dipandang belum sensitif gender.

Partisipasi perempuan yang rendah, khususnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMK dan PT. Setidaknya ada tiga alasan yang sering dikemukakan berkenaan dengan hal ini. *Pertama*, tidak tersedianya sarana dan prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SLTP ke atas di daerah sekitar tempat tinggal. Karena alasan jarak dan keselamatan selama perjalanan menuju ke sekolah menyebabkan banyak orang tua keberatan menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, relatif tingginya biaya pendidikan. Biaya pendidikan masih belum terjangkau oleh kebanyakan penduduk, khususnya yang tidak mampu. *Ketiga*, masih dianutnya sejumlah norma yang merugikan perempuan, misalnya pandangan yang menyatakan bahwa anak perempuan lebih diperlukan dalam membantu orang tua menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah, sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu menambah penghasilan keluarga.

Faktor benefit terlihat dari dominannya laki-laki dalam posisi sebagai penentu kebijakan, khususnya dalam lembaga birokrasi di bidang pendidikan, demikian juga pada jabatan-jabatan akademis kependidikan. Karena itu, laki-laki lebih banyak menikmati posisi strategis dalam jabatan-jabatan struktural.

Pentingnya Perspektif Gender dalam Pendidikan Nasional

Memperjuangkan kesetaraan bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi bukanlah

mempertentangkan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada upaya membangun hubungan (relasi) yang setara. Kesempatan harus terbuka sama luasnya bagi laki-laki dan perempuan, sama pentingnya untuk mendapatkan pendidikan, makanan yang bergizi, kesehatan, kesempatan kerja, dan sebagainya.³

Dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan bidang pendidikan, menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pendidikan yang berwawasan gender menjadi pilihan yang strategis walaupun tentu saja merupakan pilihan yang berat mengingat banyaknya hambatan yang akan dihadapi.

Langkah konkrit yang perlu segera diambil adalah merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Paling tidak tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan itu mencakup tiga hal pokok. *Pertama*, membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis, dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. *Kedua*, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi di tingkat pendidikan menengah dan tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian profesionalisme. *Ketiga*, memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi.

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara optimal, terlebih dahulu perlu ditingkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan atas dasar gender pada semua bidang dan pada semua tingkatan pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Demikian pula perlu ditingkatkan partisipasi perempuan, terutama

³Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 128

pada tingkat pengambilan keputusan di semua unit pengelolaan pendidikan nasional.

Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih egaliter. Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan pemerintah (Departemen Pendidikan) sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, sekolah secara kelembagaan dan terutama guru. Dalam hal ini diperlukan standardisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender. Selain itu, guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender. Berikutnya, seluruh penulis bahan bacaan dan para penanggungjawab dalam bidang pengembangan kurikulum diberikan orientasi tentang kebijakan pendidikan yang erperspektif kesetaraan dan keadilan gender sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi kurikulum dan buku-buku bacaan sekolah yang bias gender.

Tinjauan Umum tentang Kurikulum

Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".

Kita mengenal berbagai macam kurikulum ditinjau dari berbagai aspek. Dilihat dari struktur dan materi pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakan:⁴

⁴S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 178-196

1. Kurikulum terpisah-pisah (*separated curriculum*), kurikulum yang mata pelajarannya dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya, mata pelajaran sejarah diberikan terpisah dengan mata pelajaran geografi, dan seterusnya.
2. Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*), kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Misalnya Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan fusi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah Sekolah Dasar.
3. Kurikulum terkorelasi (*corelated curriculum*), kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain.

Proses Pengembangan Kurikulum

Kurikulum memang harus dibuat, disusun dengan proses tertentu. Negara yang memiliki undang-undang pendidikan nasional mempunyai kepentingan untuk menyusun kurikulum tersebut berdasarkan amanat yang ada di dalam undang-undang tersebut. Untuk menyusun kurikulum nasional, sudah barang tentu ada lembaga tertentu yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun atau mengembangkan kurikulum yang akan digunakan secara nasional. Di Indonesia, lembaga itu dikenal sebagai Pusat Kurikulum, yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional (Balitbang Diknas). Ada beberapa pemangku kepentingan yang menurut David G. Armstrong biasanya dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: *Curriculum specialist* (spesialis kurikulum, ahli kurikulum); *Teacher/instructors* (guru/instruktur); *Learners* (peserta didik); *Principals/corporate unit supervisors* (kepala sekolah/unit pengawas sekolah); *Central office administrators/corporeate administrators* (administrator kantor pusat/-administrator perusahaan); *Special experts* (ahli special); *Lay public representatives* (perwakilan masyarakat umum).

Yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berbagai faktor seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu, teknologi berpengaruh dalam proses pengembangan kurikulum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum fokus awal memberi petunjuk jelas apakah kurikulum yang dikembangkan tersebut kurikulum dalam pandangan tradisional ataukah modern.

Melakukan evaluasi, inovasi, reformulasi, dan rekonstruksi kurikulum agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman menjadi tugas dan tanggungjawab semua tenaga pendidikan. Namun demikian, ujung tombak pelaksanaannya adalah guru atau dosen. Sejalan dengan makna pengembangan kurikulum tersebut maka tujuan pengembangan kurikulum adalah diperolehnya kurikulum yang kompetitif dan aktual.⁵

Materi dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Terkait dengan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.⁶

Merancang Kurikulum yang Berkesetaraan

Secara umum, kurikulum pendidikan masih sarat dengan ideologi patriarki. Hal ini dapat dilihat dari beragam aspek, misalnya dari struktur dan kultur atau secara umum dari guru, lingkungan pembelajaran, serta dari buku-buku teks. Komposisi guru di sekolah misalnya, menunjukkan betapa dunia pendidikan kita masih bias gender. Situasi ini pun semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak buku teks pelajaran masih menampilkan teks dan sekaligus gambar-gambar yang bias gender. Peran perempuan di sektor

⁵Arief Furchan, Muhaimin dan Agus Maimun, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 115-116

⁶<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/prinsip-pengembangan-kurikulum/>

domestik, dan peran laki-laki di sektor publik. Mestinya, guru sebagai agen perubahan mempunyai sikap yang reorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

Kurikulum pendidikan mestinya mempertimbangkan kesetaraan (*equality*), bukan sekedar perubahan posisi. Dalam pendidikan, sedikitnya ada empat hal yang harus diingat. *Pertama*, guru. Guru harus berperspektif gender, karena ia adalah ujung tombak pendidikan. Percuma bicara kesetaraan dalam pendidikan atau mengubah buku-buku bacaan bila gurunya tidak mendukung. *Kedua*, buku-buku. Seperti yang sudah disinggung tadi, buku-buku bacaan yang masih gender perlu diubah. Ini berkaitan dengan peran guru juga, karena kalau ternyata guru sudah bagus perspektif gendernya, tetapi buku-bukunya belum mendukung, maka transformasi nilai-nilai yang berperspektif pada kesetaraan dan keadilan gender masih belum bisa berhasil maksimal. *Ketiga*, proses pembelajaran. Dalam proses ini, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sama. Jadi walaupun ada perbedaan, seharusnya hal itu didasarkan pada kemampuannya, jangan atas dasar jenis kelamin. *Keempat*, penghargaan terhadap guru. Sebenarnya tidak ada yang namanya kebijakan atau ketentuan bahwa tidak boleh mengambil contoh di luar buku bacaan. Namun, pihak guru sendiri yang seakan-akan enggan memberi contoh-contoh. Hasil penelitian pun menunjukkan keengganan tersebut didorong oleh kondisi sosio-ekonomi guru. Ada pernyataan bahwa "*Untuk apa saya kerja keras kalau tidak sebanding dengan apa yang saya terima*".⁷

Lembaga pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasi melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Kurikulum merupakan unsur utama terlaksananya pengarusutamaan gender dalam pendidikan.

Ada empat level integrasi yang ditawarkan dalam strategi dan kerangka kerja untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum.

⁷Pinky Saptandari & Diah Retno Sawitri, *Menuju Kebebasan: Perempuan dan Pendidikan* (Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2005), hlm. 85-87

1. *Contributions Approach*. Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender telah dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang ada.
2. *Additive Approach*. Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Pemikiran dan ide-ide baru mengenai gender dapat dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada.
3. *Transformational Approach*. Pada pendekatan ini tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender.
4. *Social Action Approach*. Pada pendekatan ini siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dalam kelas mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi itu, bagaimana keadaan dalam kelas apakah ada diskriminasi, dan bagaimana diskriminasi itu harus disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan supaya siswa dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan sosial.⁸

Kurikulum Integrasi Kesetaraan Gender

Pengembangan model integrasi kurikulum kesetaraan gender yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional adalah bagian dari pengembangan kurikulum inovatif. Model kurikulum integrasi kesetaraan gender yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan sangatlah perlu karena peserta didik diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan. Upaya yang dilakukan itu untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity and equality*).

⁸Susilaningsih & Agus M. Najib (ed), *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dan McGill IISEP, 2004), hlm. 31-33.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kesetaraan gender ini sangat penting untuk dipahami oleh peserta didik dari tingkat pendidikan anak usia dini, dan salah satunya di tingkat menengah. Pemahaman kesetaraan gender ini telah tercantum dalam berbagai peraturan nasional, yang juga berakar dari instrumen internasional, sebagaimana termuat dalam:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kemudian Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
3. Konvensi Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kesetaraan gender yang terdapat di dalam peraturan tersebut, perlu dipahami oleh peserta didik melalui kurikulum, bisa tertuang dalam mata pelajaran secara mandiri ataupun terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Masing-masing tentu saja memberikan dampak yang berbeda-beda. Kalau dilihat dari padatnya mata pelajaran yang telah diberikan kepada siswa SLTP dan SLTA sudah begitu banyak, maka konsep kesetaraan gender ini sebaiknya terintegrasi, dengan berbagai alasan, antara lain: (1) Model yang dikembangkan terintegrasi melalui mata pelajaran, (2) Tidak merubah struktur kurikulum yang berlaku, (3) Tidak menambah alokasi waktu yang tersedia, (4) Materi yang dikembangkan kontekstual dan faktual, (5) Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dapat diintegrasikan atau dirumuskan ke dalam indikator atau kegiatan pembelajaran.

Sedangkan nilai-nilai kesetaraan gender yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum, antara lain : *persamaan hak laki-laki dan perempuan, perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, partisipasi laki-laki dan perempuan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan, kerjasama laki-laki dan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, menghargai kemajemukan, dan demokrasi..* Nilai-nilai kesetaraan gender tersebut dapat diintegrasikan dalam kurikulum, dan dapat disebarkan pada berbagai mata

pelajaran. Adapun langkah-langkah pengembangan dalam kurikulum yaitu: (1) Merumuskan visi, misi, tujuan sekolah, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum berbasis kesetaraan gender, (2) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi yang dapat diintegrasikan oleh nilai-nilai kesetaraan gender dari masing-masing mata pelajaran, (3) Mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam indikator dan/atau kegiatan pembelajaran pada silabus dan rencana pembelajaran.

Inklusi Gender di Perguruan Tinggi

Kajian gender di perguruan tinggi diarahkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma pertama dapat diselenggarakan dengan cara, misalnya, pendidikan dan pengajaran inklusi gender. Cara ini dilakukan dengan: (1) Menjadikan mata kuliah gender sebagai mata kuliah mandiri; (2) Memasukkan materi dan atau isu gender pada salah satu materi pendidikan dan pengajaran; (3) Memasukkan isu gender pada materi pengajaran tanpa menyebutkan secara spesifik dengan sub topik materi gender.

Dari ketiga cara di atas, kemungkinan yang paling mudah dan dapat dilaksanakan dengan baik adalah mengintegrasikan gender ke dalam mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah rumpun ilmu sosial dan keagamaan, serta dalam mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan, seperti psikologi pendidikan, dasar-dasar pendidikan, strategi pembelajaran, pengelolaan kelas dan lain sebagainya.

Penutup

Memperjuangkan kesetaraan bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada upaya membangun hubungan (relasi) yang setara dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Maka pendidikan yang berwawasan gender menjadi pilihan yang strategis. Langkah konkrit yang perlu segera diambil adalah merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional, antara lain dalam kurikulum sensitif gender. Model kurikulum integrasi kesetaraan gender yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan merupakan hal yang prinsip karena peserta didik diharapkan dapat memahami secara mendalam

tentang pentingnya kesetaraan gender. Upaya inilah yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity dan equality*). *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb*.*

Daftar Pustaka

- Ahmad Muda, Fauzi. *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Furchan, Arief. Muhaimin dan Agus Maimun, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- 1<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/prinsip-pengembangan-kurikulum/>.
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Saptandari, Pinky dan Diah Retno Sawitri. *Menuju Kebebasan: Perempuan dan Pendidikan*. Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2005.
- Susilaningsih dan Agus M. Najib (ed). *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dan McGill IISEP, 2004.
- Wahidah Fuad, Ariyana. "Relevansi Gerakan Feminisme dengan Konsep Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed. Mursyidah Thahir. Jakarta: PP Muslimat NU dengan Logos Wacana Ilmu, 2000.